BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Koperasi

Pengertian koperasi sendiri berasal dari kata *co-operation* yang berarti usaha bersama. Menurut **G. Mladenta** yang dikutip oleh **Subandi (2010:19)** menyebutkan bahwa :

> **Koperasi ialah usaha bersama, merupakan badan hukum, anggota ialah pemilik dan menggunakan jasanya dan mengembalikan semua penerimaan diatas biayanya kepada anggota sesuai dengan transaksi yang mereka jalankan.**

Sedangkan menurut **Muhammad Hatta** yang dikutip oleh **Subandi (2010:18)** adalah :

> **Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan member jasa kepada kawan berdasarkan 'seorang buat semua dan semua buat seorang.**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 (revisi 1998) tahun 2007 mendefinisikan koperasi sebagai berikut :

> **Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.**

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa, koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang berkerjasama secara kekeluargaan dalam menjalankan usahanya, untuk mempertinggi kesejahteraan anggotanya.

2.1.1.1 Jenis-jenis Koperasi

Salah satu tujuan pendirian koperasi didasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan koperasi dibentuk dalam beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut.

Menurut **Ikatan Akuntan Indonesia** dalam "Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan" no. 27 (revisi 1998) tahun 2007 disebutkan jenis-jenis koperasi yang berkembang dewasa ini dan yang membedakan jenis koperasi tersebut adalah usaha yang mereka jalankan. Jenis koperasi tersebut terdiri atas:

1. **Koperasi Konsumen.**
2. **Koperasi Produsen.**
3. **Koperasi Simpan Pinjam.**
4. **Koperasi Pemasaran.**

Dengan uraian penjelasan diatas sebagai berikut :

1. Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir ataupemakai barang atau jasa, dan kegiatannya atau jasa utamanya melakukan pembelian bersama.
2. Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya tidak memiliki rumah tangga usaha atau perusahaan sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan atau memasarkan barang atau jasa serta kegiatan utamanya menyediakan, mengoperasikan, atau mengelola sarana produksi bersama.

3. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatan atau jasanya menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman untuk anggotanya.
4. Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggotanya para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa dan kegiatan utamanya melakukan pemasaran bersama**.**

Sedangkan Menurut **Subandi (2009:35)** adalah :

1. **Koperasi Konsumsi.**
2. **Koperasi Produksi.**
3. **Koperasi Pemasaran.**
4. **Koperasi Kredit/Simpan Pinjam.**

Dengan uraian penjelasan diatas sebagai berikut :

1. Koperasi Konsumsi adalah Koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya. Jenis konsumsi yang dilayani oleh suatu koperasi konsumsi sangat tergantung pada ragam anggota dan daerah kerja tempat koperasi didirikan.
2. Koperasi Produksi adalah yang kegiatan utamanya memproses bahan baku menjadi barang jadi/setengah jadi. Tujuannya adalah untuk menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna meningkatkan barang-barang tertentu melalui proses yang meratakan pengelolaan dan memiliki sendiri.
3. Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang dihasilkan. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan mata rantai niaga, dan mengurangi sekecil mungkin keterlibatan perantara didalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan.

4. Koperasi Kredit/Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam pemupukan simpanan dari para anggotanya untuk dipinjamkan kembali kepada anggotanya yang membutuhkan bantuan modal untuk usahanya.
5. Selain itu koperasi simpan pinjam juga bertujuan untuk mendidik anggotanya bersifat hemat dan gemar menabung serta menghindarkan anggotanya dari jeratan para rentenir.

Dapat disimpulkan koperasi-koperasi tersebut hadir untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat pada umumnya. Penulis teliti koperasi simpan pinjam hadir untuk memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat dalam hal dana, dalam bentuk simpanan dan pemberian kredit atau pinjaman.

2.1.1.2 Modal koperasi

Koperasi dalam melakukan usahanya erat kaitannya dengan permodalan atas sumber dana. Dalam suatu koperasi, permodalan koperasi berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. Dalam UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 41 yang dikutip oleh **Arifin Sitio dan Halomoan Tamba (2007:53)** dinyatakan permodalan koperasi terdiri dari:

a. Modal sendiri

b. Modal pinjaman

Dengan uraian penjelasan diatas sebagai berikut :

1. **Modal sendiri** yang berasal dari:

   a. Simpanan Pokok

      Sejumlah uang yang sama banyaknya dan atau sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan Pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota.

   b. Simpanan Wajib

      Sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama dan wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu tertentu . Simpanan Wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota.

   c. Modal Sumbangan

      Sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Modal sumbangan tidak dapat dibagikan kepada anggota selama koperasi belum dibubarkan.

   d. Dana Cadangan

      Sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimaksud untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

2. **Modal Pinjaman** yang terdiri dari:

   a. Anggota, pinjaman dari anggota ataupun calon anggota yang memenuhi syarat.

   b. Koperasi lain

c. Bank dan lembaga keuangan lainnya

d. Sumber lainnya

2.1.2 Pengertian Pengendalian Intern

Pengendalian Intern merupakan suatu bentuk tindakan untuk mengarahkan kegiatan yang mencakup koreksi atas kekurangan-kekurangan yang ada serta penyesuaian tindakan atau kegiatan agar selaras dengan patokan-patokan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan. **Mulyadi (2008:163)** mengemukakan bahwa:

> **Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.**

Definisi sistem pengendalian intern tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut, sehingga pengertian pengendalian berlaku baik di perusahaan yang mengolah informasinya secara manual dengan mesin pembukuan atau dengan komputer.

Sedangkan pengertian pengendalian intern menurut **Amin Widjadja Tunggal (2007:70)** mengungkapkan bahwa:

> **Sistem Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:**
> **(1) Efektifitas dan efisiensi operasi,**
> **(2) keandalan pelaporan keuangan,**
> **(3) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.**

Dari berbagai pengertian diatas, dapat disimpulkan ternyata struktur pengendalian intern dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Pengendalian Intern Akuntansi (*Internal Accounting Control*) dan Pengendalian Internal Administrasi (*Internal Administrasi Control*).

Pengendalian akuntansi mencakup rencana organisasi dan semua metode dan prosedur terutama yang menyangkut pengamanan harta perusahaan serta keandalan (*reliability*) catatan-catatan keuangan. Pada umumnya meliputi pengendalian-pengendalian seperti misalnya kewenangan dan persetujuan pemisahan tugas-tugas yang berhubungan dengan operasi atau perlindungan harta, pengamanan fisik dari harta dan pemeriksaan intern.

Pengendalian Administrasi terdiri dari rencana dan semua metode-metode prosedur yang terutama berhubungan dengan efisiensi operasi dan ketaatan pada kebijakan manajemen dan biasanya hanya berhubungan secara tidak langsung dengan catatan finansial. Pada umumnya meliputi pengendalian-pengendalian seperti misalnya analisa statistik, laporan pelaksanaan program latihan dan pengertian kuantitas.

Dari beberapa pengertian pendapat mengenai pengendalian intern yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa pengertian pengendalian intern adalah suatu jaringan pekerjaan yang berhubungan dengan prosedur-prosedur yang erat hubungannya satu sama lain yang dikembangkan menjadi suatu skema untuk melaksanakan, mengukur, dan memperbaiki diri sebagian aktifitas perusahaan yang telah direncanakan dan dikoordinasikan sehingga mengamankan harta miliknya, menguji ketelitian dan kebenaran data akuntansi, meningkatkan

efisiensi operasi serta mendorong ditaatinya kebijakan-kebijakan yang telah digariskan oleh pimpinan perusahaan.

2.1.2.1 Tujuan Pengendalian Intern

Sistem pengendalian inten (*internal control system*) menurut **James A. Hall** yang diterjemahkan oleh **Dewi Fitriasari & Deni Arnos Kwery (2007:181),** terdiri atas berbagai kebijakan, praktik dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan untuk mencapai 4 tujuan umumnya, diantaranya :

1. **Menjaga aktivitas perusahaan.**
2. **Memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi.**
3. **Mendorong efisiensi dalam operasional perusahaan.**
4. **Mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan oleh pihak manajemen.**

Sedangkan menurut **Mulyadi (2008:181)** tujuan pengendalian intern sebagai berikut:

1. **Keandalan informasi keuangan.**
2. **Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.**
3. **Efektifitas dan efisiensi operasi.**

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pengendalian intern ini adalah keandalan informasi keuangan, dimana pengendalian intern ditujukan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan harus disajikan secara wajar yang sesuai dengan prinsip akuntansi di Indonesia. Kepatuhan pemeriksaan intern terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dan juga peningkatan kegiatan operasi pemeriksaan inetrn secara efektif dan efisien.

2.1.2.2 Unsur-unsur Pengendalian Intern

Untuk mengetahui apakah pengendalian intern tersebut berjalan dengan memuaskan atau tidak, maka perlu adanya unsur pengendalian intern yang dilakukan secara langsung terhadap seluruh aktifitas dalam perusahaan. Komponen penting pengendalian intern menurut **Mulyadi (2008:164)** mengungkapkan lima komponen yang saling terkait, yaitu:

1. **Lingkungan Pengendalian Intern** (*Control Environment).*
2. **Penaksiran risiko** (*Risk Assesment*).
3. **Aktivitas Pengendalian** (*Control Activities*).
4. **Informasi dan Komunikasi** (*Information and communication*).
5. **Pemantauan** (*Monitoring).*

Sedangkan menurut **Ikatan Akuntan Indonesia (2011 : 319)**, menyatakan unsur-unsur pengendalian adalah sebagai berikut :

1. **Lingkungan pengendalian.**
2. **Sistem akuntansi.**
3. **Prosedur pengendalian.**

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pengendalian intern diantaranya Lingkungan Pengendalian, Penaksiran Risiko, Informasi dan komunikasi Akuntansi, Sistem Akuntansi, Prosedur Pengendalian dan Pemantauan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. **Lingkungan Pengendalian Intern** (*Control Environment)*, menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern serta menyediakan disiplin dan struktur.

2. **Penaksiran risiko** (*Risk Assesment*), adalah analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimanan risiko harus dikelola.
3. **Aktivitas Pengendalian** (*Control Activities*)**,** adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.
4. **Informasi dan Komunikasi** (*Information and communication*), adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka.
5. **Pemantauan** (*Monitoring),* adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu.

2.1.2.3 Keterbatasan Pengendalian Intern

Hal-hal yang memperlemah pengendalian intern terdiri dari beberapa faktor. **Azhar Susanto (2007:117)** menyimpulkan faktor-faktor yang dapat memperlemah sistem pengendalian intern, yaitu sebagai berikut:

1. **Kesalahan.**
2. **Kolusi.**
3. **Penyimpangan manajemen.**
4. **Manfaat dan biaya.**

Keterbatasan pengendalian intern tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kesalahan

   Kesalahan sering kali dilakukan, baik itu oleh manajemen atau personil lain dalam mempertimbangkan keputusan yang diambil atau dalam pelaksanaan

tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lain.

2. Kolusi

   Kolusi yaitu tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan. Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian internal yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau terdeteksinya kecurangan oleh pengnedalian intern yang dirancang.

3. Penyimpangan manajemen

   Manajer suatu organisasi memiliki bnayak otoritas dibandingkan karyawan biasa, sehingga proses pengendalian hanya efektif pada tingkat manajemen bawah sedangkan pada manajemen tingkat atas tidak efektif. Kemungkinan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh para manajer adalah rendahnya kualitas pengendlaian intern.

4. Manfaat dan biaya

   Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern.Manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kualitatif dan kuantitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu pengendalian intern.

Berdasarkan kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa betapapun baiknya pengendalian intern, pada pelaksanaannya tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh faktor-faktor yang dapat memperlemah pengendalian intern.

2.1.2.4 Aktifitas pengendalian Intern

Aktivitas pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan pengendalian telah tercapai. **Azhar Susanto (2007:119)** menyimpulkan prosedur pengendalian dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu:

1. **Otorisasi atas transaksi dan aktivitas.**
2. **Pemisahan fungsi.**
3. **Rancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai.**
4. **Persamaan fisik dan penggunaan harta atau pencatatan.**

Dengan uraian penjelasan sebagai berikut :

1. Otorisasi atas transaksi dan aktivitas

   Manajemen tidak mempunyai cukup waktu dan tenaga untuk mengawasi seluruh aktivitas atau menyetujui semua keputusan yang diambil, maka disusun kebijakan umum dan diadakan pelimpahan wewenang kepada karyawan agar dapat melakukan aktivitas serta membuat keputusan sesuai dengan uraian tugas, wewenang atau kekuasaan yang dilimpahkan kepada karyawan sesuai dengan jabatannya tersebut yang dinamakan *authority.*

2. Pemisahan fungsi

   Dalam pengendalian intern yang baik, seorang pegawai tidak dibenarkan untuk melakukan keseluruhan proses transaksi atau bertanggung jawab atas beberapa transaksi sekaligus, dengan maksud menghindari terjadinya kesalahan yang tidak disengaja maupun bentuk kejahatan lainnya. Pembagian tugas perlu dilakukan, diantara fungsi-fungsi pencatatan (*recording*), otorisasi (*Authorization*) dan penyimpanan (*Custody*).

3. Rancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai

   Rancangan dan penggunaan dokumen dan penatatan dapat membantu meyakinkan keakuratan dan kelengkapan pencatatan semua data yang berhubunngan dengan transaksi atau kejadian.

4. Persamaan fisik dan penggunaan harta atau pencatatan

   Prosedur-prosedur di bawah ini dapat digunakan untuk mengamankan fisik terhadap kejahatan, penyalahgunaan wewenang, maupun bencana alam, adalah sebagai berikut:

   a. Pengawasan dan pembagian tugas secara efektif.
   b. Pemeliharaan catatan harta yang akurat, termasuk informasi.
   c. Pembatasan akses fisik terhadap harta.
   d. Pembatasan akses ke lokasi penyimpanan.
   e. Pengamanan catatan dan dokumen.
   f. Pengendalian lingkungan.
   g. Pembatasan akses *file* dan informasi lainnya dengan menggunakan kode keamanan atau *password.*

2.1.2.5 Prosedur Umum Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit secara umum dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

1.Secara Aktif.

2.Secara Pasif.

Dengan uraian penjelasan diatas sebagai berikut:

1. Secara Aktif, yaitu terjun atau berkecimpung langsung ke lapangan dengan melakukan penelitian, penyuluhan penggunaan pinjaman dan pembinaan kecakapan berusaha terhadap nasabah
2. Secara Pasif, yaitu berpegang pada administrasi yang ada di kantor pemberi jasa kredit menurut transaksi yang terjadi

Pada hakikatnya sistem pengendalian intern pemberian kredit yang baik adalah sistem yang terdiri dari lima unsur pengendalian intern, yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan yang semuanya ditetapkan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan akan tercapai yaitu memperoleh laba. Setiap transaksi pemberian kredit kepada nasabahnya, seluruh pegawai koperasi berpegang teguh pada satu konsep pengendalian agar terjadi kesamaan dan kebenaran tindakan.

2.1.3 Kredit

Istilah kredit berasal dari perkataan latin "*Credo*", yang berarti *I believe, I Trust*, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Meskipun banyak penulis mengemukakan bahwa kredit berasal dari kata "*Credere*" yang berarti kepercayaan. Sedangkan bagi si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali.

2.1.3.1 Pengertian Kredit

Pengertian kredit menurut **Malayu S.P Hasibuan (2008:87)** adalah sebagai berikut :

> **"Jenis-jenis pinjaman yang harus dibayarkan bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati."**

Sedangkan menurut **Kasmir (2007:102)** kredit didefinisikan sebagai berikut :

> **"Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.**

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah perjanjian antara dua pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman berikut dengan bunga pinjaman kepada pihak pemberi pinjaman tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya**.**

2.1.3.2 Unsur-Unsur Kredit

Dalam kata kredit terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Sehingga jika kita membicarakan tentang kredit maka termasuk unsur-unsur yang ada di dalamnya. Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit menurut **Kasmir(2008:103)** adalah sebagai berikut :

> **Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut : (1) Kepercayaan, (2) Kesepakatan, (3) Jangka Waktu, (4) Resiko, (5) Balas Jasa.**

Jadi dalam pemberian kredit terdapat lima unsur, yaitu:

1. **Kepercayaan**

   Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan. Oleh sebab itu sebelum kredit

dikucurkan terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap permohonan kredit dari nasabah.

2. **Kesepakatan**

   Disamping unsur percaya di dalam kredit juga terdapat unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjin dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. **Jangka Waktu**

   Setiap kredit yang diberiakan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (di bawah satu tahun), jangka menengah (satu sampai tiga tahun) dan jangka panjang (di atas tiga tahun).

4. **Resiko**

   Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagih. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit maka semakin besar pula resikonya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik yang disengaja oleh nasabah maupun yang tidak disengaja.

5. **Balas Jasa**

   Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan yang diperoleh dari pemberian kredit.

Sedangkan unsur-unsur yang terdapat dalam kredit menurut **Thomas Suyatno(2007:14)** adalah :

a. Kepercayaan.
b. Waktu.
c. *Degree of Risk.*
d. Prestasi.

Yang diuraikan dalam penjelasan berikut ini :

a. **Kepercayaan,** yaitu keyakinan dari si peminjam kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang, jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tetentu dimasa yang akan datang.

b. **Waktu,** yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.

Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

c. ***Degree of Risk,*** yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memindahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi tingkat resikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah timbulnya jaminan dalam pemberian kredit.

d. **Prestasi** yaitu, objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat bentuk barang atau jasa. Namun kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang kita jumpai dalam praktek perkreditan.

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam kredit diantaranya adalah kepercayaan, jangka waktu, resiko, balas jasa dan kepercayaan yang ada dalam kredit.

2.1.3.3 Tujuan Kredit

Tujuan pemberian kredit menurut **Kasmir (2008:100)** adalah sebagai berikut:

> **Tujuan pemberian kredit adalah untuk mencari keuntungan, membantu usaha nasabah dan membantu pemerintah.**

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi tersebut didirikan. Dalam prakteknya tujuan pemberian kredit dalah sebagai berikut :

a. Mencari keuntungan

Tujuan utama dari pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan yang diperoleh adalah berbentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, disamping itu keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank.

b. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membatu nasabah yang sedang membutuhkan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana

tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluaskan usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

c. Membantu pemerintah

Tujuan lainnya dalah untuk membatu pemerintah di berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh bank maka akan semakin baik, mengingat dengan semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam meningkatkan pembangunan di berbagai sektor.

Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah dengan pemberian kredit oleh bank adalah :

1. Penerimaan pajak
2. Membuka kesempatan kerja
3. Meningkatkan jumlah barang dan jasa
4. Menghemat devisa negara terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apa bila sudah dapat diproduksi didalam negri dengan fasilitas kredit jelas akan menghemat devisa negara.
5. Meningkatkan devisa negara untuk produk yang dihasilkan dari fasilitas kredit dan diekspor keluar negri.

2.1.3.4 Fungsi Kredit

Fungsi kredit menurut **Malayu SP Hasibuan (2008:88)** adalah sebagai berikut:

1. **Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian.**
2. **Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.**
3. **Memperlancar arus barang dan arus uang.**
4. **Meningkatkan hubungan internasional (L/C,CGL, dan lain-lain)**
5. **Meningkatkan produktivitas dana yang ada.**

6. **Meningkatkan daya guna (*utility*) barang.**
7. **Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat.**
8. **Memperbesar modal kerja perusahaan.**
9. **Meningkatkan income per capital (IPC) masyarakat.**
10. **Mengubah cara berfikir/ bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.**

2.1.3.5 Jenis-jenis Kredit

Beragam jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. Kebutuhan dan yang beragam menyebabkan jenis kredit juga menjadi beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah. Jenis-jenis kredit menurut **Kasmir(2008:103)**adalah sebagai berikut :

> **Secara umum jenis kredit jika dilihat dari berbagai segi antara lain : dilihat dari segi kegunaan, dilihat dari segi tujuan kredit, dilihat dari segi jangka waktu, dilihat dari segi jaminan dan dilihat dari segi sektor usaha.**

Dari pernyataan diatas dapat kita lihat jenis-jenis kredit menurut seginya adalah sebagai berikut :

1. Dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitas.

b. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi.

b. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi.

c. Kredit perdagangan

Merupakan kredit yangdiberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahunatau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

a. Kredit pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian.

b. Kredit perternakan

Merupakan kredit yang diberikan untuk sektor pertenakan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

c. Kredit industri

Merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri,baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.

d. Kredit pertambangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang.

e. Kredit pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

f. Kredit profesi

Merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional.

g. Kredit perumahan

Merupakan kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang.

2.1.3.6 Prinsip-prinsip Kredit

Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama pemberian kredit benar-benar terwujud sehingga kredit yang diberikan dapat mengenai sasaran dan terjaminan pengembalian kredit tersebut tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian. Prinsip pemberian kredit menurut **Kasmir (2008:108)** adalah:

> **Tiga macam konsep tentang prinsip pemberian kredit bank adalah sebagai berikut : prinsip-prinsip 5C, prinsip 7P dan prinsip 3R.**

Jadi untuk menilai suatu kredit layak atau tidak diberikan, maka digunanakan prinsip 5C, 7P dan 3R. Prinsip-prinsip pemberian kredit tersebut adalah sebagai berikut :

Prinsip penialain kredit dengan 5C adalah sebagai berikut :

a. ***Character***
b. ***Capacity***
c. ***Capital***
d. ***Collateral***
e. ***Condition of economy***

Berikut merupakan penjelasan 5C sebagai berikut :

a. ***Character***

Penilaian *character* nasabah merupakan masalah yang cukup kompleks karena berkaitan dengan watak dan prilaku seseorang baik secara individual maupun kelompok komunitas atau lingkungan usahanya. Pejabat penilai dalam melakukan penilaian karakter debitur perlu memperhatikan terutama sifat-sifat sebagai berikut: kejujuran, kecerdasan, ketulusan, kesehatan, kebiasaan-kebiasaan, temperamental, kaku, membanggakan diri secara berlebihan dan sebagainya.

Informasi lain yang juga sangat perlu diketahui adalah apakah calon debitur tersebut masuk dalam Daftar Orang Tercela (DOT) atau daftar hitam.

b. *Capacity*

Capacity berkaitan dengan kemampuan peminjam mengelola usahanya secara sehat untuk kemudian memperoleh laba sesuai yang diperkirakan. Penilaiankemampuan tersebut perlu untuk mengetahui sejauh mana hasil usaha debitur dapat membayar semua kewajibannya tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit.

c. *Capital*

Penilaian modal dilakukan untuk melihat apakah debitur memiliki modal yang memadai untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya. Semakin besar jumlah modal yang ditanamkan oleh debitur kedalam usaha yang akan dibiayai dengan dana bank semakin menunjukan keseriusan debitur dalam menjalankan usahanya tersebut.

d. *Collateral*

Penilaian barang jaminan yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit bank yang diperolehnya adalah untuk mengetahui sejauh mana nilai jaminan atau agunan tersebut dapat menutupi risiko kegagalan pengembalian kewajiban-kewajiban debitur.

e. *Condition of economy*

Berkaitan dengan keadaan ekonomi suatu saat yang secara langsung mempengaruhi kegiatan usaha debitur. Untuk meneliti kondisi ekonomi perlu diperhatikan.

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7Pmenurut **Kasmir (2008:110)** sebagai berikut :

Prinsip penialain kredit dengan 7P adalah sebagai berikut :

a. ***Personality***
b. ***Party***
c. ***Purpose***
d. ***Prospect***
e. ***Payment***
f. ***Profitability***
g. ***Protection***

Berikut merupakan penjelasan 7P sebagai berikut :

a. ***Personality***

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah.

b. ***Party***

Yaitu mengkalasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

c. ***Purpose***

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Karena tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan.

d. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting juga mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

e. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk mengembalikan kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik.

f. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

g. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Selain dua prinsip di atas, ada pula prinsip 3R menurut **Kasmir (2008:113)** yaitu:

a. *Return/Returning*

b. *Repayment*

c. *Risk Bearing Ability*

Berikut merupakan penjelasan 3R sebagai berikut :

a. ***Return/Returning*** **(hasil yang dicapai)**

Return disini dimaksudkan penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh debitur setalah dibantu dengan kredit oleh bank. Persoalanya adalah apakah hasil tersebut dapat untuk menutup pinjaman serta bersamaan dengan itu memungkinkan pula usahanya terus berkembang atau tidak. *Return* disini dapat pula diartikan keuntungan yang diperoleh oleh bank apabila memberikan kredit kepada pemohon.

b. ***Repayment*** **(pembayaran kembali)**

Dalam hal ini bank harus menilai berapa lama calon debitur dapat membayar kembali pinjaman sesuai dengan kemampuan membeyar kembali dan apakah kredit harus diangsur atau dilunasi sekaligus diakhir periode.

c. ***Risk Bearing Ability*** **(kemampuan untuk menanggung resiko)**

Dalam hal ini bank harus menilai sampai sejauh mana debitur mampu menanggung risiko kegagalan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Koperasi bisa dikatakan sudah cukup luas dikenal oleh masyarakat Indonesia. Meskipun sudah dikenal secara luas sejak lama, namun masih terdapat banyak salah paham dikalangan masyarakat. Adapun sebagian orang menyebut koperasi sebagai badan ekonomi yang berbeda dari perusahaan-perusahaan lain yang harus dikelola seefisien dan seprofesional mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-

besarnya. Ada pula sebagian yang menyebut koperasi sama halnya dengan badan sosial tugas utamanya membantu mensejahterakan anggotanya dengan cuma-cuma.

Pengertian dari koperasi menurut **Tiktik Sartika Pratomo (2007:4)** menyatakan bahwa:

> **Koperasi bisa juga didefinisikan sebagai organisasi yang didirikan dengan tujuan bersama untuk menunjang kepentingan ekonomi para anggotanya melalui suatu perusahaan bersama.**

Pengertian kredit menurut **Teguh P. Muljono (2007:9)** adalah sebagai berikut:

> **Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang telah disepakati.**

Jadi kredit adalah pemindahan dana kepada para peminjam untuk mendapatkan keuntungan atas jasa yang diberikan kepada peminjam, didasarkan pada kepercayaan kedua belah pihak dan berdasarkan persetujuan pinjam meminjam hutang atau pinjaman setelah jangka waktu tertentu bahkan dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan atau disepakati.

Pengendalian merupakan fungsi manajemen yang melaksanakan analisa atas seluruh aktivitas perusahaan. Fungsi ini sangat penting karena mengahsilkan pertimbangan dan saran yang bermanfaat untuk perencanaan berikutnya. Adanya pengendalian di perusahaan, maka diharapkan seluruh aktivitas dapat berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelunya. Oleh karena itu

pengendalian intern diperlukan sebagai suatu alat yang dapat membantu pimpinan perusahaan dalam pengendalian aktivitas perkreditan yang akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan perusahaan.

Pengertian pengendalian intern menurut **Azhar Susanto (2007:103)** adalah sebagai berikut :

Pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan ynag meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui:

1. Efisiensi dan efektifitas operasi
2. Penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya
3. Ketaatan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku

Jadi pengendalian internal adalah proses yang dapat dipengaruhi manajemen dan karyawan dalam menyediakan secara layak suatu kepastian mengenai prestasi yang diperoleh secara objektif dalam penerapannya tentang bagian laporan keuangan yang dapat dipercaya, diterapkannya efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan operasional perusahaan dan diterapkannya peraturan dan hukum yang berlaku agar ditaati oleh semua pihak.

Definisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan pengendalian internal adalah:

1. Keandalan laporan keuangan.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan.
3. Mendorong dipatuhi undang-undang dan peraturan-peraturan yang ditetapkan manajemen.

Tujuan utama pengendalian internal pada kredit adalah untuk mengarahkan kegiatan pemberian kredit agar dapat mengurangi terjadinya kegagalan perkreditan dan mengurangi terjadinya kredit macet. Kredit mempunyai risiko yang cukup tinggi yakni terjadi kemacetan pada saat pemberian kredit, risiko kemacetan kredit pada saat jatuh tempo dapat dikurangi dengan menjalankan pengendalian intern secara efektif.

Syarat-syarat pengajuan kredit di dalam Koperasi umum adalah:

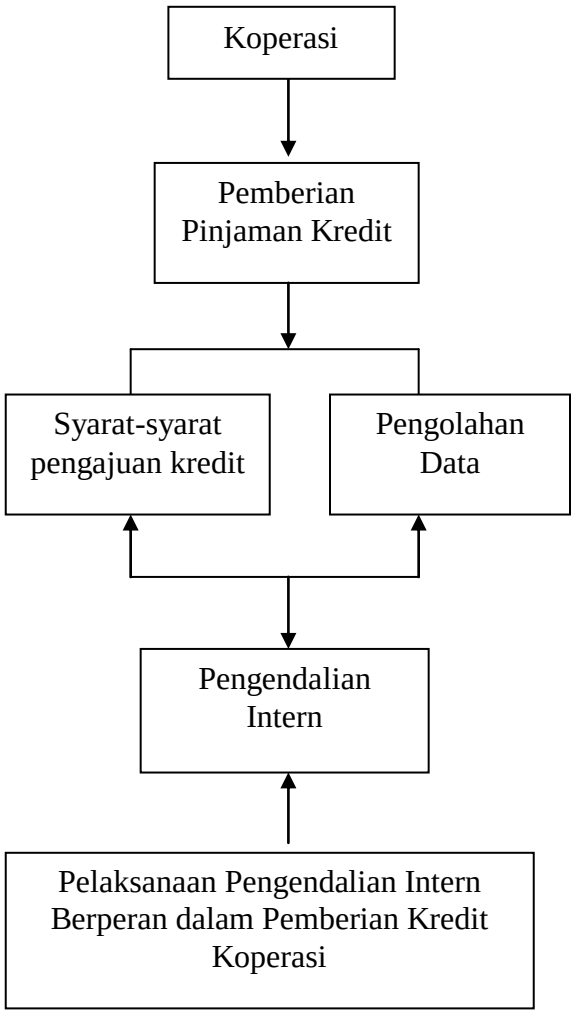
1. Memiliki penghasilan.
2. Mengisi formulir pengajuan pinjaman dengan lengkap.
3. Melampirkan KTP suami-istri dan KK.
4. Tujuan pinjaman harus jelas dan diisi pada form pengajuan.
5. Melampirkan laporan keuangan bagi anggota yang berwiraswasta.
6. Melampirkan slip gaji terakhir untuk anggota yang bekerja.
7. Melampirkan RAPB untuk Pinjaman Modal.
8. Telah menjadi anggota minimal 6 bulan.
9. Telah mengikuti pembekalan.
10. Tidak memiliki Tunggakan, baik simpanan wajib atau kewajiban lain.

Koperasi harus dapat mengendalikan risiko kredit yang diberikanya. Untuk menghindari terjadinya penyimpangan kegiatan pemberian kredit dari tujuan yang sebenarnya. Koperasi harus mempunyai kebijaksanaan kredit yang teratur dan jelas, dengan memperhitungkan berbagai macam faktor dan kriteria yang menentukan mutu kebijaksanaan tersebut. Biasanya kriteria yang umum dan harus dilakukan oleh bank

untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak yaitu dengan analisis 5C. **Rachmat Firdaus (2004:83)** terdiri dari:

> **Penilaian dengan analisis 5C meliputi : *Character, capacity, capital, condition dan collateral.***

Dengan adanya pengendalian intern pada pemberian kredit atau pembiayaan diharapkan perusahaan dapat mencapai tujuannya seperti adanya kesinambungan operasional perusahaan dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan yang terjadi. Oleh karena itu pengendalian intern berperan dalam menunjang kelancaran pemberian kredit.



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran